

**DEMOKRASI BERUJUNG KONFLIK-KONFLIK SOSIAL PASCA
PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KHASUS DI DESA SEKUNGGUNG
KECAMATAN DEPATI VII, KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI)**

LAILA SUTRINI, MEGAWATI, NOPANTRI
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:

Lailasutrini57@gmail.com

Megawati1301@gmail.com

Nopantri993@gmail.com

ABSTRACT

Village head elections are a form of democratic party that is so popular that it is held every five years, likewise with the election of the village head which was held in sekungkung village, Depati seven District. The purpose of this research is to find out what conflicts have occurred after the election of the village head, as well as what are the causes of post-election social conflicts, the location of this research is in sekungkung village, Depati seven District, Kerinci regency. This study used 5 informants, namely one village head election committee, 2 youth and women leaders and 2 community members who participated in the village head election. The data collection technique used in this study was in-depth interviews, the final results of this study concluded that there were indeed some social conflicts after the village head election in sekungkung village, Depati seven districts of kerinci, social conflicts that occurred such as actions of not greeting each other among residents, actions resignations made due to the defeat of the chosen candidate, and also a bit of rioting that occurred between members of the community, one of the factors causing social conflict after the election of the village head in sekungkung village was the difference in views between each supporter for the candidate he chose and also acts of fanaticism which resulted in anarchist actions by supporters.

Keywords: *Democracy, social conflicts, village head elections.*

ABSTRAK

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, begitupula dengan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di desa sekungkung kecamatan depati tujuh ini, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konflik-konflik apa saja yang terjadi pasca pemilihan kepala desa, serta hal apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik-konflik sosial pasca pemilu, lokasi penelitian ini yaitu di desa sekungkung kecamatan depati tujuh kabupaten kerinci, penelitian ini menggunakan 5 informan yaitu 1 orang panitia pemilihan kepala desa, 2 orang tokoh pemuda dan pemudi serta 2 orang warga masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan kepala desa, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, hasil akhir dari penelitian ini menyimpulkan bahwa memang terdapat

beberapa konflik sosial pasca pemilihan kepala desa di desa sekungkung kecamatan depati tujuh kabupaten kerinci, Konflik sosial yang terjadi seperti aksi tidak saling tegur sapa antar warga, aksi pengunduran diri yang dilakukan akibat kekalahan kandidat yang dipilih, dan juga sedikit aksi kericuhan yang terjadi antar warga masyarakat, Faktor penyebab terjadinya konflik sosial pasca pemilihan kepala desa di desa sekungkung salah satunya yaitu adanya perbedaan pandangan antar masing-masing suporter/pendukung terhadap kandidat yang dipilihnya dan juga aksi fanatisme yang mengakibatkan aksi anarkis yang dilakukan para suporter/pendukung.

Kata Kunci : Demokrasi, konflik-konflik sosial, pemilihan kepala desa.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam stuktur negara Indonesia. Peran Desa tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk itu desa sepatutnya dilengkapi dengan perangkat yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Menurut pasal 202 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan bahwa: Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa serta perangkat desa lainnya. Sekretaris desa sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Adapun kepala desa dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh masyarakat dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah (Linda Uzman & Atika. M, 2019:364).

Pemilihan kepala desa merupakan bagian dari prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat yang ada di desa, yang tidak bisa dipisahkan dalam sistem pemerintahan daerah. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat ikut serta berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang ada di level desa. Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat. Selain itu pilkades juga merupakan bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan di tingkat pedesaan (Ali, dkk. 2017:32)

Desa Sekungkung merupakan salah satu desa di Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci. Sama halnya dengan desa pada umumnya, Desa Sekungkung juga dipimpin oleh seorang kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya. Menjelang akhir masa jabatan kepala desa maka dilaksanakan pemilihan kepala desa yang baru. Akan tetapi karena pemilihan kemudian menimbulkan ketidakpuasan pada beberapa pihak sehingga muncullah konflik.

Konflik sosial yang ada di Desa Sekungkung Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci terjadi pada akhir tahun 2021 . Pemilihan kepala Desa di Desa Sekungkung diikuti oleh pasang calon kepala desa yakni dimenangkan oleh calon

pertama, yang artinya memberikan kewenangan untuk memerintah desa selama lima tahun ke depan. Akan tetapi keputusan hasil pemilihan ini tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat kemudian mempertanyakan hasil keputusan pemilihan kepala desa dan melayangkan kritik terhadap kepala desa terpilih beserta keluarganya. Protes tersebut dipicu oleh hasil suara dengan selisih satu suara . tindakan tidak terima kekalahan tersebut bukan dilakukan oleh kandidat yang kalah melainkan dilakukan oleh para supporter/pendukung dari calon kades yang kalah dalam pemilihan kepala desa. Pola interaksi masyarakat desa yang masih sangat lekat dan informasi yang disampaikan secara utuh menjadikan kondisi semakin memburuk. Akibatnya masyarakat terpecah menjadi dua kubu dan mencullah konflik sosial. Konflik-konflik sosial yang terjadi pada pesta demokrasi itupun mengakibatkan terjadinya perselisihan dan aksi anarkis dari masing-masing pendukung calon kepala desa. Bahkan ujung dari konflik yang terjadi yaitu mengakibatkan terjadinya tindakan tidak saling tegur sapa antar masing-masing pendukung calon kepala desa sebagai akibat dari sikap fanatisme yang mempertahankan kandidat/calonya masing-masing.

Konflik sendiri pada dasarnya merupakan bentuk dinamika dalam masyarakat. Konflik dapat terjadi karena jika tidak adanya keselarasan dan kesesuaian di dalam masyarakat, bilamana keinginan keduanya tidak dapat dicapai dengan baik atau disatukan dan juga dapat ditandai dengan perbedaan dan perdebatan yang sangat mencolok. Hal ini dapat terjadi karena pluralisme atau keanekaragaman merupakan realitas kehidupan dalam masyarakat modern. Apalagi pada masyarakat pedesaan yang berdekatan dengan gunung yang berwatak keras dan juga keanekaragaman individu manusia dsengan sifat-sifat yang berbeda, konflik dapat terjadi karena diakibatkan oleh hal seperti itu (Kartini Kartono, 1982:246) dalam (Linda Usman, Atika M,2019).

Sebagai salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat, maka proses pengelolaan terhadap konflik mutlak untuk dilakukan. Hal ini untuk menghindari konflik terbuka yang tentunya akan membawa kerugian yang lebih besar. Dalam proses penyelesaian konflik sosial tentunya bukan hanya tugas dari kepala desa semata, melainkan juga dari seluruh kalangan masyarakat. Konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah tanggung jawab bersama untuk segera diselesaikan agar tidak berkepanjangan dan mengganggu keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat. Dalam menangani dan menyelesaikan sebuah konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena berbagai pertimbangan yang harus ditempuh dan dilaksanakan. Kepemimpinan yang baik adalah dimana masyarakat atau anggota-anggotanya bisa menerima dengan baik saran dari pemimpinnya.

Begitupula dengan cara-cara tokoh dalam menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat, umumnya memang berbeda pada setiap-setiap daerah, tergantung pada kemampuan dan persoalan yang sedang di hadapi. Seperti yang di ungkapkan oleh Sondang Siagin (2010) dalam (Linda Usman, AtikaM,2019), bahwa pemimpin yang demokratis sangat peduli pada kepentingan dan kebutuhan para pahlawan,dan menghargai suatu peranan para bawahan di dalam proses pengambilan keputusan

dengan cara memberitahukan kepada para bawahan tersebut bahwa ia telah mengambil keputusan tersebut.

Penelitian mengenai konflik dalam proses pemilihan kepala Desa sendiri telah banyak dilakukan. Penelitian ini membahas tentang konflik pilkades yang dimana konflik tersebut disebabkan oleh tindakan dan aksi anarkis dari masing-masing pendukung dan juga karena tindakan tidak terima kekalahan dari pendukung yang kalah, dari kedua faktor ini yang mengakibatkan suatu perselisihan dalam Pilkades. terdapat beberapa bentuk dan faktor yang menyebabkan konflik dalam Pilkades desa Sekungkung. Pertama, konflik pilkades ini terjadi karena adanya aksi anarkis yang dimulai oleh salah satu pendukung dari calon kepala desa, yang kemudian dibalas lagi oleh pendukung dari kubu lain sehingga mengakibatkan kericuhan kecil yang terjadi pada saat itu yang kemudian dilerai oleh beberapa orang tokoh masyarakat. Kedua, dari adanya tindakan tidak terima kekalahan dari pendukung calon yang kalah menimbulkan protes yang dilayangkan terkait hasil pemilihan kepala desa dari kubu pasangan calon yang tidak menang.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja konflik sosial yang terjadi pasca pemilihan kepala desa di Desa Sekungkung Kecamatan Depati VII ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu timbulnya konflik-konflik sosial pasca pemilihan kepala Desa di Desa Sekungkung Kecamatan Depati VII ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konflik-konflik apa saja yang terjadi pasca pemilihan kepala desa di Desa Sekungkung Kecamatan Depati VII.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu timbulnya konflik-konflik sosial pasca pemilihan kepala Desa Sekungkung Kecamatan Depati VII.

1.3 Tinjauan Pustaka

Pengertian Demokrasi

Secara etimologi demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan rakyat. (Sukarna,1981) mengutip pendapat Abraham Lincoln yang menegaskan bahwa Democracy is government from the people by the people and for the people. Dengan demikian dalam sistem demokrasi ini rakyatlah yang memegang kekuasaan sebab pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Kartini Kantonu) yang mengemukakan bahwa “Demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut mengambil alih bagian dalam pemerintahan”. Demokrasi sebagai suatu gejala masyarakat yang berhubungan erat dengan perkembangan negara, mempunyai sifat yang berjenis-jenis. Masing-masing seperti terlihat dari sudut kemasyarakatan yang ditinjaunya.

“Demociacy is a form government in which the will of the governed executed (put into practice) without causing any harm to human rights” Bila

diterjemahkan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahannya tanpa menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi dikenal adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Demokrasi memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk merealisasikan diri dan mengaktualkan setiap gengsi dan bakatnya menjadi manusia utuh yang menyadari jati dirinya. Demokrasi memberikan kebebasan penuh untuk berkarya dan berpartisipasi dalam bidang sosial politik di tengah lingkungan sendiri sesuai dengan fungsi dan misi hidup setiap orang. Oleh karena itu demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang memungkinkan individu untuk hidup bebas dan bertanggung jawab (Sukarna,1981).

Teori Konflik

Teori konflik berkembang pertama kali pada Dekade 1950-an hingga 1960-an, seiring dengan meredupnya pengaruh teori struktural fungsional. Sebagaimana teori struktural fungsional, teori konflik pertama kali berkembang di daratan eropa dan kemudian menyeberang ke amerika berkat peran sejumlah teoretikus. Ralf Dahrendorf, seorang eksponen teori konflik utama, memulai teorinya di hamburg, ia pernah menjadi direktur di London School Of Economic pada tahun 1974- 1984. Sebelum kemudian mengabdikan dirinya di St. Antony's College, Oxford pada tahun 1974-1997. Selain Ralf Dahrendorf, Lewis Coser juga seorang imigran dari eropa yang mengembangkan teori konflik, terutama memfokuskan pada fungsi konflik bagi masyarakat. Coser secara konsisten mengkritik teori fungsional yang “menguasai” dunia akademik amerika, selain itu Coser juga mengkritik kebijakan represif terhadap perkembangan pemikiran Marxis (komunis) pada dekade 1950-an. Teori konflik merupakan teori yang berkembang sebagai reaksi dan kritik langsung terhadap teori struktural fungsional.

Para teoritikus konflik menganggap bahwa teori struktural fungsional memiliki sejumlah kelemahan mendasar dalam menganalisis realitas sosial. Kelemahan yang menyolok menurut para teoritikus konflik terletak pada sejumlah asumsi yang digunakannya. Keberatan para teoritikus konflik terhadap teori struktural fungsional terutama terletak pada pandangan bahwa konflik yang dilihatnya sebagai patologis dan bersifat destruktif bagi masyarakat. Teori konflik sebaliknya melihat bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki unsur-unsur konflik, selain unsur-unsur integratif semisal konsensus sosial.

Teori konflik yang pada mulanya berkembang dibenua eropa berakar dalam karya-karya Mark, Weber, dan Simmel. Karya-karya awal Mark dapat dipandang sebagai titik tolak perkembangan teori konflik. Bagi Mark, sejarah manusia pada dasarnya merupakan sejarah perjuangan manusia. Hubungan antara sumber daya material dan akuisisi adalah sirkular. Pihak yang satu mengontrol yang lain karena memiliki sumber daya yang lebih banyak dibandingkan pihak yang dikontrol tersebut. Tingkat ketimpangan kekuasaan yang paling ekstrem yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Dalam masyarakat kapitalis ini moda produksi dan hak milik di privatisasikan, dalam moda produksi seperti ini, komoditas (termasuk tenaga kerja) diperjualbelikan

dipasar guna mendapatkan uang. Secara umum kondisi buruh mengalami alienasi, Kondisi buruh yang tidak menguntungkan pada gilirannya akan melahirkan revolusi yang merupakan ekspresi konflik kaum buruh terhadap kaum borjuis pemilik kapital.

Dalam *the german ideologi* Marx dan Engels mulai mengangkat persoalan ideologi dan mengkritik sesuatu yang ironis, mengingat pengistimewaan proletariat dalam teori mereka potensi kaum borjuis bahwa kepentingan mereka tak lain adalah kepentingan rakyat umum. Pada tahun 1848, Marx dan Engels menerbitkan karyanya yang amat terkenal yaitu *the communist manifesto*. Karya ini merupakan sebuah polemik yang brilliant dan menguraikan suatu dimensi utama proyek Marx: suatu penilaian atas peradaban kapitalis yang sangat ambivalen, peradaban yang menjadikan segala sesuatu menjadi mungkin, dan serentak menyingkirkan realisasi-diri potensi kemanusiaan. Dalam karya ini juga terdapat aksioma bahwa semua sejarah adalah sejarah perjuangan kelas (Haryanto 2016:40).

Bentuk Konflik Sosial

Dikutip dari laman <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/>, konflik-konflik yang terjadi di masyarakat dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk di bawah ini.

a. Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni konflik destruktif dan konflik konstruktif. Berikut rinciannya.

1) Konflik Destruktif

Konflik destruktif merupakan konflik yang terjadi karena adanya perasaan tidak senang, dendam, benci dari seseorang atau suatu kelompok kepada pihak lain. Misalnya kasus konflik Poso, Ambon, Kupang, dan sebagainya yang terjadi karena bentrokan fisik sehingga menyebabkan hilangnya nyawa dan harta benda.

2) Konflik Konstruktif

Konflik konstruktif merupakan konflik yang sifatnya fungsional. Ia akan muncul jika terjadi perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok yang menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.

b. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

Konflik juga dapat dikelompokkan berdasarkan posisi pelaku yang sedang berkonflik. Berikut rinciannya.

1) Konflik Verbal

Konflik verbal merupakan konflik antarkomponen masyarakat dalam suatu struktur yang disusun secara hierarkis. Seperti, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan sebuah kantor.

2) Konflik Horizontal

Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang kedudukannya relatif sama. Sebagai contoh konflik yang terjadi antara organisasi massa.

3) Konflik Diagonal

Konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Misalnya konflik yang terjadi di Aceh.

Selanjutnya Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dari laman <https://www.gramedia.com/literasi/teori-konflik/>, konflik dikelompokkan menjadi lima bentuk sebagai berikut.

- a. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
- b. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.
- c. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
- d. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
- e. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.

Selain pendapat di atas, secara umum bentuk konflik terdiri dari konflik yang berbentuk kekerasan fisik dan kekerasan non fisik (Budi Setiawan, 2017:20):

- a. Kekerasan fisik: yaitu jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya adalah: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, dan lain-lain.
- b. Kekerasan non fisik: yaitu jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu; 1) Kekerasan verbal: kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya: membentak, memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memfitnah, menyebarkan gosip, menuduh, menolak, dan 2) Kekerasan psikologis/psikis: kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Contohnya memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan, mendiamkan, mengucilkan, memandang yang merendahkan, mencibir dan memelototi.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yg digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari generalisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode alamiah Sugiyono (2019:18)

2.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sekungkung Kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci. Pada penelitian ini berkaitan dengan permasalahan demokrasi berujung konflik-konflik sosial pasca pemilihan kepala Desa di Desa Sekungkung Kecamatan Depati VII.

2.1.3 Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018:456). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, dalam hal ini para aktor yang terlibat dalam konflik.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018:456). Data sekunder penelitian ini adalah data yang diambil dengan cara pencatatan, pengambilan data atau dokumen dari objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan topik-topik, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan erat dengan masalah demokrasi berujung konflik-konflik sosial pasca pemilihan kepala desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah desa sekungkung

Masyarakat suku Kerinci adalah masyarakat yang memegang teguh adat adat istiadat, masyarakat suku Kerinci menganut sistem matrilineal dimana silsilah keturunan menuntut kepada keluarga Ibu, masyarakat suku ini berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Kerinci. Suku ini merupakan tipikal masyarakat yang dekat dengan alam, suku ini banyak melahirkan kebudayaan dan kearifan lokal yang kaya akan nilai kultural. Suku ini merupakan tipikal masyarakat yang dekat dengan alam, suku ini banyak melahirkan kebudayaan dan kearifan lokal yang kaya akan nilai kultural. Sebagai salah satu suku yang tertua suku Kerinci menjadi sebuah bagian sejarah penying dalam peradaban manusia Indonesia.

Depati adalah anak laki-laki dari pihak ibu yang diangkat secara sah oleh masyarakat untuk memimpin masyarakat yang ada di daerahnya tersebut, yang telah diangkat secara sah oleh masyarakat sesuai dengan hukum adat, dalam peranannya depati merupakan orang yang memiliki peranan didalam masyarakatnya, terutama anak kemenakannya, disamping itu Depati merupakan tempat bertanya didalam masyarakat. Para Depati ini mempunyai wilayah kekuasaannya yang disebut dengan ajun arah. Depati VII yang sekarang adalah kecamatan Depati Tujuh, sebenarnya tidak ada 7 (tujuh) Depati di daerah ini,

dikarenakan Depati yang ada di Kubang ini berdiri sendiri, sementara di dusun lain Depatinya mempunyai kerabat atau koloninya, contohnya ada 4(empat) Depati di Kubang dan 3 (tiga) Depati di daerah lain maka disebut dengan Depati Tujuh, tetapi ketika di tulis Depati yang di Kubang ini tidak ditulis dikarenakan para Depatinya berdiri sendiri dan mandiri.dari awal terbentuknya dusun Kubang ini ada 7(tujuh) Depati hanya di hitung empat Depati saja, diantaranya adalah : 1. Depati Kubang dan Depati Janggut daerah kekuasaannya dusun baru 2. Depati Seleman dan Sulaiman Kodrat daerah wilayah kekuasaannya Koto simpai 3. Depati Agung daerah wilayah kekuasaannya Kubang gedang 4. Depati Ngaleh daerah Kekuasaannya Koto panjang dan Larik panjang. Kata-kata Depati tidak bisa di ganggu gugat sama sekali karena Depati adalah pemegang hukum tertinggi di daerah Kerinci.

Adat merupakan gagasan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang yang lazim dilakukan disuatu daerah, apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kekacauan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang menyimpang, fungsi adat adalah untuk pembinaan persatuan dan kesatuan masyarakat. Karena adat istiadat memiliki seperangkat norma, kaidah, dan keyainan sosial yang masih dihayati dan dipelihara oleh masyarakat.

3.1.2 Letak Geografis

Desa Sekungkung terletak dalam wilayah Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Wilayah ini memiliki luas 25.822 Ha yang terdiri dari 3 Dusun Jarak dari Ibu Kota Kabupaten yang berada di Kota Sungai Penuh sejauh + 12 Km, dengan waktu tempuh diperkirakan + 10 Menit, jarak ke ibu kota propinsi +07 km, serta mempunyai ketinggian kira-kira 800-1200 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 17-24 c.

3.1.2.1 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1. Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk 246 KK dengan jumlah jiwa :

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk

LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
499 JIWA	432 JIWA	931 JIWA

Sumber: Data Pemerintahan Desa Sekungkung Tahun 2022

b. Tingkat Kesejahteraan Keluarga:

- 1) Prasejahtera : 112 Keluarga
- 2) Sejahtera 1 : 124 Keluarga
- 3) Sejahtera 3 Plus : 10 Keluarga

2. Keadaan Ekonomi

a. Mata Pencaharian

Mata pencaharian Desa Sekungkung sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai peta.

Tabel 3.2 : Mata Pencaharian Penduduk

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Petani	351	180
2	Buruh tani	101	104

3	Nelayan	19	-
4	Pedagang	10	12
5	Pns	16	6
6	Peternak	5	5
7	Pensiunan	1	1
8	Mengurus rumah tangga	-	130

Sumber: Data Pemerintahan Desa Sekungkung Tahun 2022

b. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di desa Sekungkung sebagian besar diperuntukan untuk tanah sawah dan perkebunan.

c. Sarana dan Prasarana Desa

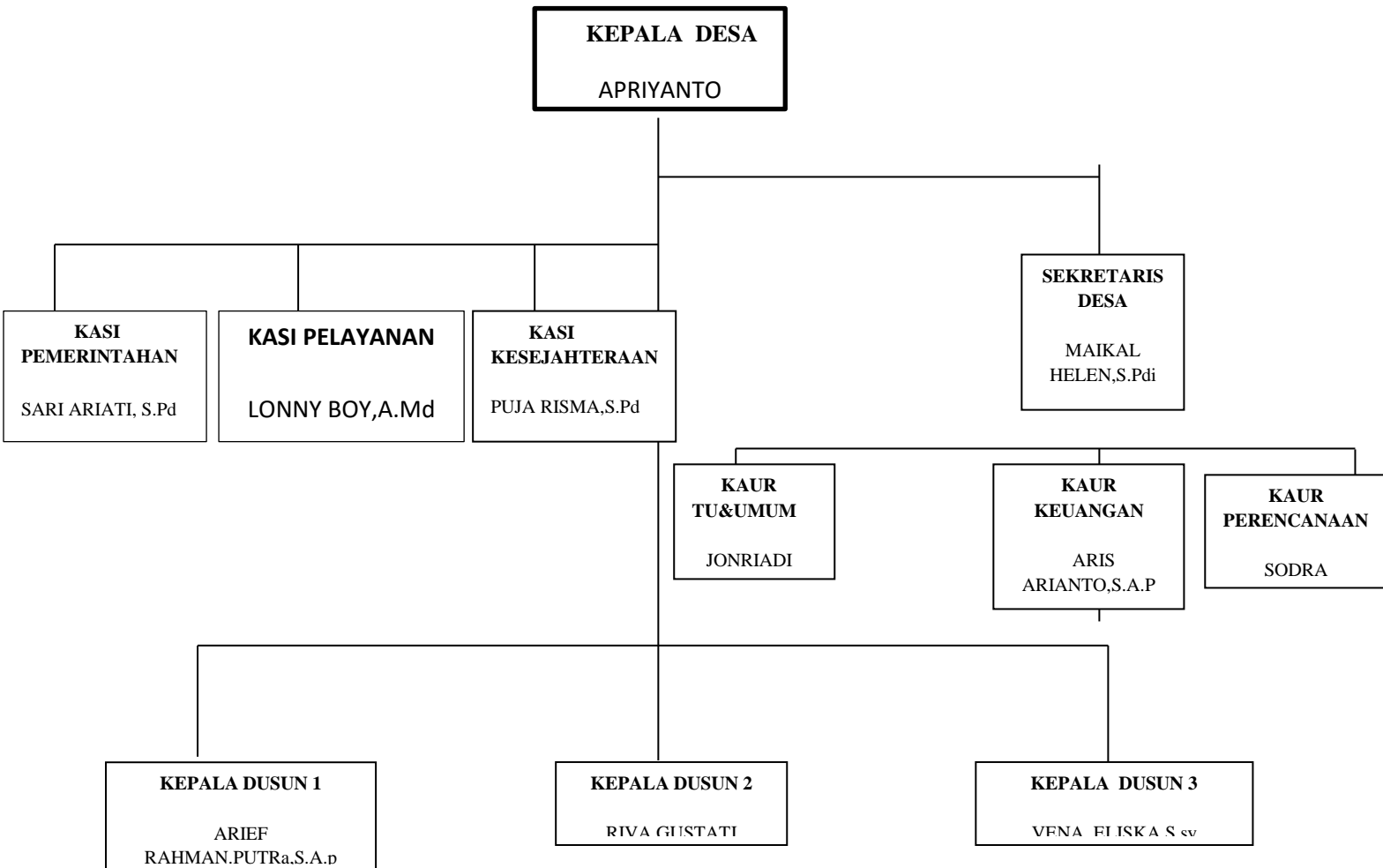
Kondisi dan jumlah sarana dan prasarana umum desa Sekungkung secara garis besar adalah sebagai berikut

Tabel. 3. 3. Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Jumlah
1	Balai desa	1
2	Sd/tk	1/1
3	Smp	1
4	Polindes	1
5	Jalan kab	2km
6	Jalan kec	1km

Sumber: Data Pemerintahan Desa Sekungkung Tahun 2022

3.1.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SEKUNGGUNG



3.2.1 Konflik sosial yang terjadi

Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya dimana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukan saingannya dengan kekerasan atau ancaman.

Menurut Fisher dalam Abdul Ghofar (2014:135) konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat, pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang dilakukan guna untuk memilih pemimpin desa untuk kedepannya. Pilkades merupakan bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat sehingga diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan di tingkat pedesaan. Pemilihan kepala desa ini pun diatur dalam undang-undang dasar nomor 6 tahun 2014. Hasil dari penelitian ini menemukan bentuk-bentuk konflik yaitu :

Konflik Fisik

Yang bentuknya kekerasan fisik adalah kekerasan yang kasat mata artinya siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik anatar pelaku dengan korbannya. Seperti yang dikatakan informan ini tergolong dalam konflik yang bentuknya kekerasan fisik.

Setelah dilakukannya kegiatan wawancara maka peneliti menarik kesimpulan bahwa memang terjadi konflik pasca pemilu yaitu salah satunya konflik kericuhan yang terjadi akibat aksi saling sindir menyindir, saut menyaut antar para pendukung yang menimbulkan kehebohan dan kericuhan kecil yang terjadi pada saat pilukades, namun sudah diatasi dan kemudian konflik sosial yang terjadi dimasyarakat yang masih berlangsung hingga saat ini.

3.3 Pembahasan

Setiap masalah yang timbul dalam proses kompetisi adalah sesuatu yang wajar dan dianggap sebagai suatu keharusan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Konflik adalah faktor yang melekat pada diri manusia sehingga konflik adalah sesuatu hal yang dianggap wajar dan langkah konstruktif dalam konteks politik didalam demokrasi. Dalam manajemen konflik, penyelesaian konflik penyelesaian konflik pilkada ini sebenarnya ada opsi lain yaitu konsensus. Dalam opsi ini adanya pemahaman bersama, dimana semua pihak harus duduk bersama dan menyelesaikan masalah secara terbuka, dengan kepala dingin transparan serta menjunjung tinggi asas keadilan dan kejujuran guna menghindari konflik pilkada ,dalam dunia politik dibutuhkan kedewasaan dalam berpolitik dan kematangan para tokohnya. Selain itu, mesti ada kesepakatan awal bagi para calon untuk siap menang dan kalah, selain deklarasi damai sehingga pemenang dengan perolehan suara berapapun harus diterima.

1. Pemilukades

Dalam demokrasi pemilukades merupakan salah satu unsur yang tidak bisa dilupakan Pemilihan Kepala Desa dalam sistem demokrasi sudah menjadi bagian dari politik, di mana masyarakat dianjurkan ikut berpartisipasi dalam pemilu. Pemilihan Kepala Desa itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di Desa. Pemilihan Kepala Desa diterapkan agar masyarakat bisa memilih pemimpin daerah dengan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak manapun. Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi tingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan Kepala Desa sangat penting karena sangat mendukung Penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sistem Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan transparan dan partisipasi masyarakat, di mana calon Kepala Desa tidak diusung oleh partai melainkan perseorangan sehingga tidak ada kepentingan partai yang di bawa oleh calon Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu hal yang dilaksanakan di setiap Desa, merupakan suatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan. Persoalan demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa tidak sekedar mengukur partisipasi masyarakat (partisipasi politik) tetapi, pemerintah sebagai

penyelenggara Negara mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang baik.

Di desa sekungkung kecamatan depati VII ini pemilukades sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan para panitia pelaksana pemilupun sudah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga dapat berjalan dengan baik walaupun sempat terjadi sedikit kericuhan namun hal tersebut bisa diatasi.

2. Konflik sosial

Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata kerja latin "configere". Artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Di mana salah satu pihak berusaha yang ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya.

Konflik sering kali berubah menjadi kekerasan terutama ada upaya-upaya dengan pengelolaan konflik tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan. Karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik. Dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta (1976), konflik berarti pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan. (dikutip dari halaman www.https.konflik.com).

Pesta demokrasi didesa sekungkung tidak bisa dipungkiri juga menimbulkan konflik-konflik sosial seperti tindakan kericuhan saat pemilu akibat aksi anrkis suporter/pendukung dari masing-masing calon hingga aksi tidak saling tegur sapa antar tetangga dengan tetangga, warga dengan warga yang lainnya, akibat perbedaan calon kades yang dipilih, hingga aksi pengunduran diri akibat dampak dari konflik sosial yang terjadi tersebut.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dan analisis bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Konflik sosial yang terjadi pasca pemilukades didesa sekungkung ada dua yaitu konflik fisik yaitu aksi lempar bangku yang dilakukan salah satu warga yang mengakibatkan kericuhan kecil, kemudian konflik verbal/non fisik yaitu aksi tidak saling tegur sapa antar warga , tetangga dengan tetangga yang lainnya , kemudian juga ada aksi pengunduran diri yang dilakukan oleh ketua BPD .
2. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial pasca demokrasi di desa sekungkung salah satunya yaitu adanya perbedaan pandangan antar setiap suporter/pendukung terhadap kandidat yang dipilihnya. Selain itu yang menjadi pemicu timbul nya konflik yaitu akibat dari sikap fanatisme yang

mempertahankan kandidat/calonya masing-masing yang Mengakibatkan aksi anarkis yang dilakukan masing-masing suporter/pendukung yang menimbulkan kericuhan.

3. Relasi Masyarakat di Desa Sekungkung kecamatan depati tujuh sebelum masa pemilihan relasi masyarakat baik-baik saja , tetapi setelah pemilihan ada yang sampai saat ini tidak melakukan interaksi sama sekali, ada juga beberapa yang relasinya yang tidak baik itu hanya sebatas masa-masa pesta demokrasi saja.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS (JAN), Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Djafar, Massa. 2015. Krisis Politik dan Proposisi Demokrasi. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Haryanto,Sindung. 2016. Spektrum Teori Sosial. Ar-ruzz Media: Jogjakarta
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). CV Alfabeta: Bandung.
- Miriam,Budiarjo. 1994. Demokrasi Di Indonesia. Gramedia Widiaswara: Jakarta
- Undang-undang No.32. Tahun 2004. Tentang pelaksanaan otonomi daerah di indonesia.
- Ali & dkk. 2017. Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa. VII (I): 31-40
- Ahmad Taufik. 2018. Tata Kelola Konflik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bnateng. VIII (I) : 15-16
- Ayu Sari Susanti. 2014. Konflik Pemilihan Kepala Desa
- Budi Setiawan. 2017. Faktor-faktor yang menyebabkan Terjadinya Konflik. Fakultas Ilmu Kesehatan. UMP.
- Brigita Raras. 2016. Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa
- Linda Usman & Atika M. 2019. Demokrasi Berujung Konflik-Konflik Sosial Pasca Pemilihan Kepala desa. Seminar Nasional
- M. Wahid. 2017. Teori Knflik Sosiologi Klasik Dan Modern. VIII (I): 34 -48
- Ma'rif Amirullah& Dewi angraini. 2020. Konflik sosial pada pilkada di luwu timur. Mocora V (I) : 10-11
- Naska Widayanti,dkk. 2019. Konflik Sosial Pada Pemilihan Kepala Desa
- Sukarna. 1981. Kekuasaan Kediktatoran Dan Demokrasi